



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 6992-7001

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pemulihan Ekonomi Biru Indonesia Pasca Pandemi

Maria Regina Nansi^{1✉}, Maria Emiliana Natalia², Nadya Revania Rohman³

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta

Email: marianansi@akprind.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan para perekonomian global, termasuk di Indonesia yang mengalami penurunan ekonomi sebesar 5,32 persen pada kuartal kedua tahun 2020. Namun, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan bahwa sektor ekonomi biru menjadi fokus utama dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Konsep ekonomi biru meliputi lima prinsip, yaitu ocean maritime security policy, ocean governance policy, ocean maritime cultural policy, ocean environmental policy, and ocean blue economy policy. Tujuan pengembangan ekonomi biru adalah menciptakan peluang kerja baru tanpa merusak lingkungan. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi biru, termasuk regulasi tentang perikanan dan pariwisata laut yang berkelanjutan. Selain itu untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pemerintah memfokuskannya pada peningkatan infrastruktur negara, seperti jaringan transportasi dan komunikasi, guna meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi kegiatan ekonomi.

Kata Kunci: *Ekonomi Biru, Pandemi COVID-19, Pemulihan Ekonomi*

Abstract

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the global economy, including Indonesia which experienced an economic decline of 5.32 percent in the second quarter of 2020. However, the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment stated that the blue economy sector is the main focus in economic recovery Indonesia. The blue economy concept includes five principles, namely ocean maritime security policy, ocean governance policy, ocean maritime cultural policy, ocean environmental policy, and ocean blue economy policy. The goal of developing the blue economy is to create new job opportunities without damaging the environment. The Indonesian government has implemented policies to support the development of the blue economy, including regulations on sustainable fisheries and marine tourism. Apart from that, to restore the economy after the COVID-19 pandemic, the government is focusing on improving the country's infrastructure, such as transportation and communication networks, to increase connectivity and facilitate economic activity.

Keywords: *Blue Economy, COVID-19 Pandemic, Economic Recovery*

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok terdeteksi adanya virus baru yang menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 atau disebut juga COVID-19. Penyebaran virus ini sangat cepat untuk mencapai seluruh dunia. Buktinya, sebulan setelah virus terdeteksi, penyakit ini sudah menyebar ke negara lain seperti Thailand, Jepang, Korea Selatan, Australia, Perancis, dan Jerman. Sehingga WHO menetapkan wabah virus ini menjadi pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020.

Pada April 2020, WHO menyatakan bahwa pandemi ini mengakibatkan banyak penurunan ekonomi global yang melebihi jatuhnya krisis keuangan global pada tahun 2008-2009. Amerika Serikat mengalami penurunan sampai pada kisaran minus 5,90 persen dan mengalami tekanan semakin dalam pada Juni 2020. Pada April 2020, ekonomi Eropa menurun sampai minus 7,50 persen dan di bulan Juni menurun lagi sampai minus 10,20 persen. Indonesia pun terkena dampak penurunan ekonomi pada Triwulan II 2020 sebesar 5,32 persen (yoy) (Fauziyanti, 2020).

Letak geografis dan astronomis Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan terletak antara 6°LU - 11°LS dan 95°BT - 141°BT. Hal ini akan berpengaruh pada iklim dan perekonomian Indonesia di lintas udara maupun lintas laut (Sinulingga & Trisni, 2018). Kepulauan Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia dengan perairan seluas 6,4 juta kilometer persegi atau setara dengan 77 persen dari total seluruh wilayahnya. Luasnya perairan Indonesia tersebut memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai ancaman seperti pencemaran, perubahan iklim,

kerusakan ekosistem, serta aktivitas manusia yang merusak perairan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2022).

Wilayah yang didominasi oleh lautan menjadikan Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan perekonomian melalui sektor ekonomi biru. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanuddin, mengatakan bahwa sektor ekonomi biru merupakan kunci penting untuk proses pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19.

Konsep Ekonomi Biru

Radiarta, et al (2015) menjelaskan tentang ekonomi biru sebagai suatu bisnis model yang memberikan keuntungan ekonomi maupun lingkungan. Arbaâ, M. (2017) juga menjelaskan bahwa ekonomi biru adalah sebuah pembangunan berkelanjutan dalam sebuah model ekonomi. Fokus pengembangannya berada di industri kelautan dan perikanan dan didorong oleh inovasi teknologi guna menciptakan lapangan pekerjaan yang baru tanpa merusak lingkungan. Pembangunan berbasis kelautan memiliki lima prinsip, yaitu kebijakan keamanan maritim, kebijakan tata kelola laut, kebijakan budaya maritim, kebijakan lingkungan laut, dan kebijakan ekonomi biru.

Konsep Ekonomi Biru fokus pada industri kelautan dan maritim dengan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan (Saksono, H., 2013). Diperlukan inovasi yang menggabungkan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat serta dukungan kebijakan dan kapasitas lembaga. Penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan pada pembangunan laut dan pesisir. Blue Economy sangat diperlukan untuk meningkatkan potensi kelautan, dan kesadaran akan prinsip Ekonomi Biru diharapkan mempengaruhi kesadaran global tentang pembangunan dan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan (Rani, F., & Cahyasari, W., 2015).

Peningkatan ekonomi kelautan harus diarahkan pada prinsip-prinsip ekonomi biru yang berorientasi pada perkembangan inovasi, kekuatan SDM, pengoptimalan sumber daya alam sekitar, dan penggunaan teknologi yang bisa memanfaatkan alam bahkan limbah yang dikembangkan agar tidak merusak lingkungan dan menambah kreativitas masyarakat (Subagiyo, et al, 2017).

Menurut Harsono (2020), ekonomi biru adalah pendekatan pengelolaan sumber daya lokal yang mengutamakan kepedulian sosial, efisiensi, efektivitas, kreativitas, dan zero waste material. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable growth equity), terutama di daerah kepulauan yang menghadapi tantangan alamiah pada beberapa musim.

Ekonomi biru memberikan manfaat signifikan, yaitu mengoptimalkan potensi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, memelihara laut dan sumber daya, menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan laut, meningkatkan ketersediaan pangan, melindungi lingkungan sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat manajemen sumber daya laut, membina dan mengawasi kelestarian lingkungan laut, melindungi spesies langka, meningkatkan kesiapan masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim dan bencana alam, mengurangi dampak pemanasan global dan kenaikan oksigen, dan mendorong inovasi dan teknologi yang tepat guna untuk mendapatkan sumber energi alternatif (Rani & Cahyasari, 2015).

Ekonomi Biru Sebelum Pandemi

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi laut yang besar. Pemerintah sudah mulai memanfaatkan potensi tersebut dengan baik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi negara namun, pemerintah belum dapat menata dan memfasilitasi untuk menerapkan konsep pembangunan kelautan berbasis ekonomi biru. Untuk melakukan pembangunan kelautan berbasis ekonomi biru diperlukan rencana yang matang maka dari itu para pemangku kepentingan harus bisa mendidik sumber daya manusia dan mengelola untuk berkreasi secara inovatif, dan berusaha mencari investor untuk modal pembangunan (Saksono, 2013).

Pemerintah telah menyusun rencana bisnis dan manajemen yang terstruktur untuk kerangka pengembangan ekonomi laut. Menurut Ervianto (2018) hal yang harus dipertimbangkan yaitu ekologi, energi, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Perencanaan ini harus mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, sosialisasi melalui berbagai media juga penting dilakukan untuk merubah pola pikir dan tindakan masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Dalam mempercepat pembangunan yang lebih produktif dan menghasilkan hal yang berkualitas di bidang manajemen dan bisnis perlu memanfaatkan ekonomi biru. Dalam melibatkan masyarakat dalam proses, maka akan tercipta lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Sehingga, ekonomi biru dapat menjadi groundbreaking dan acuan dalam pembangunan yang komprehensif dan sistemik (Saksono, 2013).

Dampak Pandemi terhadap Ekonomi Indonesia

Pandemi Covid-19 menurunkan pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia tidak terkecuali. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020 sulit dicapai dengan

pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 2,97 persen pada triwulan I dibandingkan dengan 5,06 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia menerapkankolaborasi kebijakan fiskal dan moneter untuk meredam dampak krisis, dengan fokus pada membantu pelaku ekonomi yang terdampak dan memelihara stabilitas keuangan (Sutarjo,2012).

Untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, setiap Kementerian Negara/Lembaga bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi sesuai tugas masing-masing dan saling berkoordinasi. Pemerintah telahmemberikan perintah melalui PMK 38/PMK.02/2020 kepada Menteri Keuangan untuk mengimplementasikan kebijakan keuangan negara guna mengendalikan pandemi dan menghadapi ancaman terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Kementerian Negara/Lembaga diminta menggunakan anggaran sebagai prioritas untuk mengelola pandemi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pandemi COVID-19 juga memberi banyak dampak terhadap aktivitas ekonomi usaha terutama pengusaha yang gulung tikar dan dampak dari pemutusan hubungan kerja (PHK). Maka dari itu, presiden meminta untuk memperbanyak proyek padat karya sehingga dapat membuka lapangan kerja yang luas (Jusuf, 2012).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk kualitatif-deskriptif. Metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode literature review. Metode literature review adalah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data, membaca dan mencatat berdasarkan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Nansi, 2018). Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data terkait ekonomi biru khususnya pemulihan ekonomi biru pasca pandemi COVID-19. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dengan mengumpulkan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi biru, atau yang juga dikenal sebagai blue economy adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya perairan dan kelautan secara berkelanjutan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang terdapat di sektor kelautan dan perikanan. Namun, ekonomi biru juga bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan secara bertanggung jawab.

Ekonomi biru berpotensi untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Konsep ini melibatkan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks global, ekonomi biru menjadi semakin penting karena potensi sumber daya kelautan yang sangat besar dan beragam serta peran penting laut dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan bertanggung jawab menjadi keharusan bagi negara-negara dengan wilayah laut yang luas.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Oleh karena itu, sistem ekonomi biru menjadi sangat relevan bagi Indonesia sebagai salah satu alternatif untuk mengembangkan ekonomi negara. Terlebih lagi, dengan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada ekonomi global, Indonesia perlu mencari solusi alternatif untuk memulihkan perekonomian negara. Sistem ekonomi biru dapat menjadi solusi yang tepat karena mampu memanfaatkan potensi sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang besar.

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 berdampak besar pada sektor ekonomi negara, termasuk sektor ekonomi biru. Pembatasan sosial dan pembatasan pergerakan internasional berdampak pada produksi dan ekspor komoditas perikanan dan kelautan. Penurunan permintaan dan harga komoditas ini memengaruhi pendapatan para nelayan dan petambak serta mengurangi pendapatan negara dari sektor ekonomi biru.

Selain itu, pandemi juga mempengaruhi pariwisata bahari dan industri kelautan lainnya seperti transportasi laut, industri maritim, dan penangkapan ikan. Dalam situasi pandemi, banyak wisatawan yang membatalkan rencana liburan di pantai dan pulau-pulau kecil yang menyebabkan sektor pariwisata bahari mengalami penurunan yang signifikan. Sementara itu, penurunan aktivitas transportasi laut, seperti kapal-kapal penumpang dan kapal-kargo, berdampak pada penurunan volume dan nilai ekspor komoditas kelautan dan perikanan.

Kebijakan Pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Dalam menghadapi krisis dan pelaksanaan pemulihan ekonomi biru, pemerintah harus memiliki langkah-langkah atau rencana yang tersusun dan pemanfaatan sumber daya alam

harus dilakukan secara optimal. Faktor utamanya adalah komitmen pemerintah untuk bekerjasama dengan dunia usaha. Seperti yang dikatakan oleh Pauli (2012) ada lima poin penting dalam pengembangan ekonomi biru, yaitu pemerintah perlu mencari peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan yang berbasis Blue Economy. Dengan mengidentifikasi peluang-peluang tersebut, pemerintah dapat mengembangkan potensi sektor kelautan dan perikanan yang lebih berkelanjutan.

Melalui penerapan konsep ekonomi biru, akan tercipta program-program berkelanjutan yang dapat meningkatkan produksi dan perekonomian di sektor kelautan dan perikanan. Program ini juga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di daerah pesisir dan bagi para nelayan.

Selain itu, penerapan konsep ekonomi biru juga dapat membantu menjaga dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, sehingga keberlanjutan ekosistem laut tetap terjaga. Dengan menjaga ekosistem laut yang sehat, maka keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan juga akan terjaga.

Dalam jangka panjang, penerapan konsep ekonomi biru akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Affandi, 2012). Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mendorong dan mengembangkan konsep ekonomi biru dalam rangka mempercepat proses pemulihan ekonomi negara serta mensejahterakan masyarakat, terutama di daerah pesisir dan bagi para nelayan

Seiring dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan sistem ekonomi biru. Beberapa inisiatif yang dilakukan antara lain adalah pengembangan industri kelautan dan perikanan, peningkatan produktivitas sektor perikanan, dan pemanfaatan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi produksi dan konservasi lingkungan. Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan program-program yang mendukung pengembangan ekonomi biru, seperti Program Peningkatan Produktivitas Perikanan, Program Pemberdayaan Kelompok Nelayan, dan Program Konservasi dan Pemulihan Ekosistem Laut.

Pemerintah juga telah melaksanakan beberapa strategi untuk memulihkan ekonomi birupasca pandemi, antara lain :

1. Menjaga sumber daya alam agar pertumbuhan ekonomi tidak memberikan kerusakan pada lingkungan
2. Memberikan pendidikan dan pelatihan pada masyarakat agar mendapatkan skill yang sesuai dengan pekerjaan di sektor kelautan
3. Menjalin kerjasama antarnegara untuk mencapai tujuan yang sama

4. Mengembangkan teknologi baru agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor kelautan

Prinsip-prinsip dalam pemulihan ekonomi biru juga berpotensi dalam pembangunan nasional. Terdapat tiga langkah konkret dalam penerapan blue economy oleh pemerintah yaitu :

1. Diperlukannya pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai ekosistem laut.
2. Ekosistem laut perlu dikaitkan dengan ketahanan pangan, sehingga strategi ekonomi dan sosial pembangunan dapat terintegrasi dengan keberlanjutan bahan pangan.
3. Diperlukan transaksi ekonomi yang adil terkait pasar, industri dan komunitas agar dapat beradaptasi dengan pola pembangunan yang berkelanjutan.

Ekonomi Biru atau Blue Economy bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan sumber daya lokal dengan cara yang efisien, efektif, dan produktif. Dalam konsep ini, kreativitas dan inovasi harus diikuti dengan keberlanjutan produk turunan berkualitas tinggi dan tanpa limbah, serta harga yang kompetitif untuk menyelamatkan lingkungan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan dorongan pada pelaku usaha wisata bahari dengan pekerjaan restorasi terumbu karang. Program ini bertujuan untuk menunjang taman/kebun karang. Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melaksanakan program Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP).

Pemerintah Indonesia juga telah membuat beberapa aturan atau urgensi untuk menciptakan ekonomi biru. Tim riset kolaborasi dari Laboratorium Indonesia 2045, PKSPL Institut Pertanian Bogor dan SDGs Universitas Diponegoro menyampaikan beberapa urgensi ekonomi biru bagi Indonesia, yaitu RPJMN 2020-2024 "Pembangunan ekonomi yang didasarkan pada pengelolaan sumber daya ekonomi termasuk pengelolaan kelautan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industri dan kemaritiman", Perpres No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, pemerintah telah menetapkan cetak biru kebijakan kelautan Indonesia 2021-2025 yang berbasis pada konsep ekonomi biru, dan PDB Perikanan Triwulan IV 2021 hanya Rp 126 triliun atau 2,83 persen terhadap nilai PDB nasional.

Pemerintah juga mengembangkan usaha dan investasi yang berbasis pada model tersebut. Beberapa kegiatan utama yang dapat dilakukan adalah budidaya rumput laut, artemia, garam, pakan ikan, perikanan tangkap, dan pengelolaan pulau-pulau kecil secara

berkelanjutan. Dengan demikian, isu- isu ketahanan energi, pangan, dan air bersih dapat diatasi.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memperhatikan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan melalui pelatihan pemuda dan calon pengusaha muda. Hal ini dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan Blue Economy.

Kunci keberhasilan ekonomi biru yaitu terlaksananya kebijakan yang baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan wilayah laut menjadi dasar penetapan anggaran pembangunan. Alokasi anggaran inilah yang memperlihatkan bukti konsistensi pemerintah terhadap pembangunan dan kebijakan anggaran ini akan menyebabkan rencana tersusun secara matang. Dengan memperhatikan luas laut dan perairan Indonesia akan memberikan kontribusi besar terhadap negara, sehingga dapat memakmurkan masyarakat terutama yang di kawasan pesisir.

Selain itu, pengembangan dokumentasi dan materi mengenai Blue Economy juga penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Terakhir, upaya untuk mempromosikan penyelenggaraan dan partisipasi bersama dalam pertemuan internasional juga dilakukan. Dengan cara ini, pemerintah dapat memperluas jaringan dan menjalin kerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya mengembangkan Blue Economy secara global.

SIMPULAN

Penerapan konsep ekonomi biru sebagai pemulihan pasca pandemi di Indonesia dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang berkaitan dengan dinamika pelayanan, meningkatkan kebutuhan hidup masyarakat, serta keterbatasan yang dihadapi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan di wilayah kepulauan. Wilayah laut yang luas dan melimpah di beberapa daerah membutuhkan mekanisme pengelolaan dan manajemen yang profesional guna menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan, menjaga kualitas kelautan dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Anhar Rizki 2012. Indonesia Bertekad Capai Blue Economy, VIVA News edisi 9 Juni 2012
- Arbaâ, M. (2017). Gerakan hijau di arus poros maritim (rehabilitasi mangrove Maluku Utara sebagai pilar ekonomi biru). In Prosiding Seminar Nasional Kemaritiman dan Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil (Vol. 2, No. 1).
- Ervianto, W. I. (2018). Studi Pendekatan Ekonomi Biru Untuk Infrastruktur Di Indonesia. Prosiding Semnastek.
- Fauziyanti, W., Sundari, P., & Sarbullah, S. (2020, November). Analisa Perekonomian Indonesia Triwulan III Akibat Covid19. In Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS (Vol. 3, No. 1, pp. 184-190).
- Harsono, G. (2020). Hidrografi Berbasis Ekonomi Biru: Sepilihan Esai-Esai. Pandiva Buku.
- Nansi, M. R. (2018). Analisis Strategi Penurunan Non Performing Loan Studi Kasus Pada PT Bank Permata, Tbk (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Pauli, G. A. (2010). The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs. Paradigm publications.
- PERIKANAN, K. K. D. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. (2022).
- Radiarta, I. N., Erlania, E., & Haryadi, J. (2015). Analisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru Dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process (Ahp). Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 10(1), 47-59.
- Jusuf, Gellwynn (2012). Ekonomi Biru Menjadi Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Siaran Pers Tanggal 6 Juni 2012.
- Rani, F., & Cahyasari, W. (2015). Motivasi Indonesia dalam menerapkan model kebijakan Blue Economy masa pemerintahan Joko Widodo. Transnasional, 7(1), 19141928.
- Saksono, H. (2013). Ekonomi biru: Solusi pembangunan daerah berciri kepulauan studi kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 5(1), 1-12.
- Sinulingga, A. A., Asri, S., & Trisni, S. (2018). The Thought of Developing Halal Maritime Tourism Destination Towards Indonesia's Vision as a World Maritime Axis. Jurnal PIR: Power in International Relations, 2(2), 103-113.
- Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M. (2017). Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. Universitas Brawijaya Press.
- Sutardjo, Syarif C. (2012). Ekonomi Biru dan Industrialisasi Kelautan Perikanan, 15 September 2012.